



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2302-2314

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Kacapiring Kota Bandung

Prabu Aditia Wisata^{1✉}, Ely Sufianti², Abdul Rahman³

(1) Kelurahan Kacapiring Pemerintah Kota Bandung, (2,3) Politeknik STIA LAN Bandung

Email: aditia.wisata@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan berbasis kewilayahan. Penelitian ini menganalisis strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya keterlibatan dalam perencanaan, dan rendahnya transparansi program. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan sosialisasi melalui media digital dan pertemuan warga, peningkatan keterlibatan melalui musyawarah, pemberdayaan tokoh masyarakat, dan transparansi pengelolaan program. Kolaborasi antara pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan warga diperlukan untuk membangun rasa kepemilikan terhadap program. Partisipasi yang meningkat diharapkan menjadikan PIPPK sebagai instrumen efektif dalam pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, PIPPK, Strategi Peningkatan, Kelurahan Kacapiring*

Abstract

Community participation is a key factor in the success of the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) in supporting region-based development and empowerment. This study analyzes strategies to enhance community participation in the implementation of PIPPK in Kacaping Subdistrict, Bandung City. The research employs a qualitative method through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that low community participation is caused by a lack of socialization, minimal involvement in planning, and low program transparency. Proposed strategies include strengthening socialization through digital media and community meetings, increasing involvement through deliberations, empowering community leaders, and ensuring program transparency. Collaboration between the subdistrict government, community leaders, and residents is essential to build a sense of ownership toward the program. Increased participation is expected to position PIPPK as an effective instrument for sustainable regional development.

Keywords: Community Participation, PIPPK, Improvement Strategies, Kacaping Subdistrict

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas penting dalam kebijakan publik, mendefinisikan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Partisipasi publik dalam tata kelola melibatkan berbagai aspek, mulai dari bagaimana memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan hingga bagaimana mengoptimalkan pengaruh berbagai jenis pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan (Kathryn S. Quick and John M. Bryson, 2022). Bentuknya bisa mulai dari memberikan pendapat, saran, atau kritik kepada pemerintah, menjadi sukarelawan, atau menjadi anggota organisasi masyarakat sipil. Bagi pemerintah, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien, karena kebijakan yang dikeluarkan sifatnya akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan masyarakat juga meningkat karena adanya keterlibatan masyarakat mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Pengertian partisipasi masyarakat mencakup tiga aspek penting, yaitu: keterlibatan masyarakat, dimana masyarakat memikul peran dan tanggung jawab dalam pembangunan, berbagai kegiatan, dan partisipasi masyarakat bukan merupakan suatu kegiatan tunggal tetapi mencakup serangkaian kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, yang

bertujuan untuk mencapai tujuan. dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pembangunan demokratis, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, baik dari segi kesejahteraan maupun demokrasi. (Turindra, 2023)

Pengembangan ekowisata berbasis HKM di Kalibiru menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Dukungan yang diberikan, baik dalam bentuk pendampingan maupun penyediaan akses, telah berhasil mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Hal ini membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat, masyarakat mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. (Kaharuddin, Satyawan Pudyatmoko, Chafid Fandeli, & Wisjnu Martani, 2020).

Pemerintahan Kota Bandung berupaya mewujudkan pemerataan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan dalam hal ini tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga RT RW melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan (PIPPK). Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis PIPPK, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) memiliki maksud untuk mewujudkan masyarakat Kelurahan yang mampu memetakan potensi dan permasalahannya melalui gagasan yang inovatif, perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan bisa dipertanggungjawabkan serta diawasi oleh masyarakat sendiri yang pada akhirnya mendorong partisipasi publik sebagai wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya partisipasi dan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif (Paolo Cardullo & Rob Kitchin, 2018). PIPPK memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan dan pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri di tingkat kelurahan. PIPPK dirancang untuk menjadi program yang berbasis pada masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Peraturan Walikota Bandung (Perwal) No 015 Tahun 2019, menjelaskan juga bahwa proses partisipasi masyarakat berada di setiap tahap berlangsungnya kegiatan PIPPK. Diantaranya sebagai berikut:

- Partisipasi masyarakat berperan dalam kegiatan rembuk warga dimana pemetaan masalah hingga gagasan inovatif disampaikan oleh masyarakat.

- Program yang bersifat pembangunan seperti contohnya rehabilitasi/renovasi/konstruksi ringan kantor RW, Pos Keamanan Linmas, dan sarana ibadah, pada pelaksanaannya mengikutsertakan masyarakat setempat secara gotong royong. Selain dalam segi partisipasi, hal tersebut juga sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Program yang bersifat pengembangan, pendidikan masyarakat, contohnya pelatihan, kursus, seminar, penyuluhan, yang disampaikan oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya, pada pelaksanaannya membutuhkan keikutsertaan masyarakat sebagai peserta, karena program ini ditujukan untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tingkat kehadiran masyarakat menjadi indikator kegiatan tersebut.
- Program yang bersifat pemberdayaan, biasanya berupa fasilitasi usaha ekonomi kreatif masyarakat pada kegiatan festival, lomba, atau parade yang dimaksudkan untuk memunculkan potensi, dan peluang usaha bagi UMKM.

Pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Kacapiring, juga tidak terlepas dari berbagai fenomena masalah khususnya dalam hal partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, heterogenitas kepentingan, dan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan signifikan dalam implementasi program kesejahteraan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program (M. Riyanto, & Vitalina Kovalenko, 2023). Fenomena masalah yang terjadi di Kelurahan Kacapiring diantaranya Setiap tahunnya stakeholder yang berperan dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yaitu ASN dan Ketua LKK yang terlibat dalam urusan tersebut, namun kehadiran Ketua LKK seolah-olah menjadi peran yang baku sebagai wakil dari masyarakat, sehingga pada tahap perencanaan misalnya ketika rembuk warga, kehadiran masyarakat yang diharapkan memberikan aspirasi terkait masalah di lapangan sangat minim. Kehadiran di beberapa rembuk warga di RW 02 misalnya berdasarkan data absensi kehadiran dan dokumentasi yang ada, hanya dihadiri kurang dari 5 orang. Masyarakat menganggap bahwa kehadiran Ketua RW sudah cukup mewakili suara masyarakat, hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat yang dulunya antusias kini menjadi apatis. Peningkatan infrastruktur di Desa Timoreng Panua, terutama jalan tani, tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang telah memungkinkan pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan mengalokasikan anggaran secara tepat (Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, & Muh Sutrisno, 2019).

Pemerintah Kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan, mekanisme partisipasi yang belum optimal menunjukkan perlau dilakukannya beberapa perbaikan, seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara berpartisipasi, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pengambilan Keputusan (Andi Uceng, Erfina, Ahmad Mustanir, & Sukri, 2019). Pemerintah juga harus mendorong dialog yang lebih konstruktif mengenai partisipasi warga, perlu disusun suatu tipologi partisipasi warga yang disusun secara hierarkis, tipologi ini menggunakan contoh dari tiga program sosial pemerintah federal untuk menggambarkan tingkat kekuasaan warga dalam menentukan arah dan pelaksanaan program (Arnstein, 2019)

Masyarakat kurang mengetahui informasi dan berakhir pada sikap apatis terhadap program ini, sehingga partisipasi masyarakat baik sebagai pengusul, pelaksana maupun pengawas PIPPK masih dirasa kurang, sebab tidak adanya media informasi yang mampu memberikan data konkrit mengenai pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Kacapiring. Analisis literatur menunjukkan bahwa keterlibatan warga melalui platform digital dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan kota (Islam Bouzguenda, Chaham Alalouch, & Nadia, 2019). Seperti yang terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kelurahan, khususnya di Kotabaru Tengah, masih memiliki kekurangan. Masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap usulan yang telah mereka sampaikan. Kontrol dan pengawasan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif, justru lebih dominan dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya pihak kelurahan. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kurang memiliki self belonging terhadap hasil akhir dari proses perencanaan tersebut (Fathurrahman Fadil, 2013). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Nagari Sijunjung sangat beragam. Mulai dari tahap perencanaan di mana tokoh masyarakat terlibat aktif, hingga tahap pelaksanaan di mana masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti menjadi pemandu wisata dan menjaga kelestarian lingkungan. Bahkan, masyarakat juga berperan dalam evaluasi dengan membuat peraturan nagari untuk menjaga kelestarian budaya (Dimas Alji Prasetyo & Delmira Syafrini, 2023).

Salah satu kendala yang dihadapi Kelurahan Margasari adalah adanya perbedaan persepsi di antara lembaga-lembaga pemerintahan setempat. Perbedaan pandangan ini

berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program (Gustendi, 2018) Kepemimpinan lokal, seperti ketua RT dan RW, telah memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Mekargalih. Dengan dukungan dari masyarakat, mereka telah mampu mengorganisir berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi bencana (Femil Umeidini, Eva Nuriah, Muhammad Fedryansyah, 2019). Kolaborasi yang baik antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat itu sendiri merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan kapasitas semua pihak, serta memperkuat peran lembaga seperti PKK, LPM, dan Karang Taruna, kita dapat memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (Alia & Maulana, 2019).

Melihat keadaan PIPPK dilapangan yang demikian, maka mekanisme program PIPPK perlu di evaluasi kembali dengan cara- cara yang bisa di terima masyarakat, dan mengingat situasi kondisi masyarakat yang minat partisipasinya rendah. Maka kemudian perlu adanya penelitian mengenai peningkatan partisipasi masyarakat melalui PIPPK Kota Bandung, dengan permasalahan yang ada strategi apa yang baik dan harus dilakukan demi meningkatkan partisipasi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik khususnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui PIPPK di Kantor Kelurahan Kacapiring. menjadi bahan saran dan masukan bagi semua stakeholder terkait, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan partisipasi Masyarakat melalui PIPPK.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Kacapiring, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya transparansi informasi, dan kurangnya sinergi antar stakeholder, menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sistem informasi, hingga penguatan peran lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode partisipatif, seperti optimalisasi rembuk warga dan musyawarah, digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan ide, usulan, dan masukan terkait program PIPPK. Pendekatan ini menciptakan suasana yang inklusif dan kondusif, sehingga masyarakat merasa suaranya didengar dan dihargai. Dengan adanya metode ini, keterlibatan dan kepedulian warga terhadap program pembangunan meningkat, menjadikannya strategi yang efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kacapiring memiliki luas wilayah 78 Ha dari wilayah RW 01 sampai dengan RW 09. Berdasarkan jumlah penduduknya, wilayah RW 06 merupakan wilayah dengan penduduk paling banyak, dengan jumlah 2.060 jiwa. Wilayah RW 06 didominasi oleh pemukiman penduduk, dengan jalan kecil yang saling terhubung dan beberapa perkantoran diantaranya Gedung DPRD Kota Bandung, Kantor PKK Kota Bandung, dan Kantor Kelurahan Kacapiring. Berbeda dengan wilayah RW 07 yang didominasi oleh pertokoan dengan sedikit pemukiman. Untuk mengetahui besaran jumlah sebaran penduduk di setiap wilayah RW, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Besaran Jumlah Sebaran Penduduk di Setiap RW

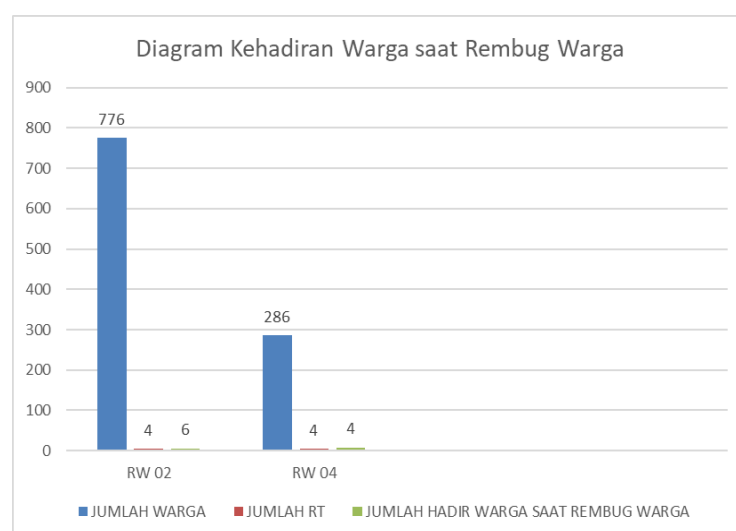
No	Jumlah RW	Jumlah Penduduk
1	RW 01	1.116
2	RW 02	776
3	RW 03	1.305
4	RW 04	286
5	RW 05	791
6	RW 06	2.060
7	RW 07	126
8	RW 08	393
9	RW 09	1.289
	Jumlah	8.142

Berdasarkan data jumlah penduduk di setiap RW, terlihat bahwa terdapat RW dengan jumlah penduduk yang banyak dan sedikit. Perbedaan jumlah penduduk ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk di wilayah RW tersebut. Pada umumnya, RW dengan jumlah

penduduk yang banyak memiliki wilayah yang lebih luas. Hal ini dapat dipahami karena kebutuhan akan ruang tinggal yang lebih besar bagi populasi yang lebih banyak. Mayoritas RW dengan penduduk yang banyak memiliki wilayah yang padat penduduk. Hal ini dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik yang lebih besar, serta potensi terjadinya permasalahan sosial dan lingkungan. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antara jumlah penduduk dan luas wilayah RW secara lebih kontekstual. Faktor-faktor lain seperti tingkat ekonomi, aksesibilitas, dan kondisi sosial masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Data jumlah penduduk dan luas wilayah RW dapat memberikan gambaran mengenai kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam upaya perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang efektif dan berkelanjutan.

Dari data di atas, menunjukkan permasalahan rendahnya partisipasi Masyarakat di wilayah Kelurahan Kacapiring, Berdasarkan konsep peningkatan partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Turindra (2023), peneliti bermaksud untuk menganalisis peningkatan partisipasi masyarakat dalam program PIPPK Kota Bandung. Dalam penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan, menunjukkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kacapiring sangat berperan dalam keberhasilan program PIPPK. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Namun, pada gambar 1 menunjukkan rendahnya kehadiran Masyarakat pada saat kegiatan rembug warga Dimana kegiatan tersebut merupakan proses awal yaitu perencanaan PIPPK.



Gambar 1. Daftar Hadir RW 02 dan RW 04 pada kegiatan Rembug Warga Tahun 2022
 Sumber: Diolah dari Laporan Kegiatan Rembug Warga 2022 Data Kelurahan Kacapiring

2. Sosialisasi yang intensif dan edukasi mengenai tujuan, manfaat, serta peran masyarakat dalam program PIPPK di Kelurahan Kacapiring terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi. Ketika masyarakat lebih memahami bagaimana program ini akan memberi manfaat langsung bagi kehidupan mereka, tingkat partisipasi meningkat. Edukasi juga membantu masyarakat mengerti pentingnya kerjasama dan peran aktif dalam mendukung pembangunan wilayah. Namun, peran tersebut tidak berjalan, pada kenyataannya kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi secara optimal, masih ada masyarakat yang membutuhkan pembangunan septictank komunal, khususnya di kawasan padat penduduk seperti di wilayah RW 01, RW 03, RW 05 Kelurahan Kacapiring, namun terdapat ketidaksesuaian perencanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) RW dengan kebutuhan tersebut.
3. *Stakeholder* seperti lurah, ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dukungan dan keterlibatan aktif memotivasi warga untuk turut serta dalam kegiatan PIPPK. Namun, belum terlihat kolaborasi yang baik dalam menciptakan kondisi iklim yang mendukung terciptanya kolaborasi. Kepemimpinan yang transparan dan komunikatif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program ini, sehingga memudahkan implementasinya di tingkat komunitas.
4. Metode partisipatif, seperti optimalisasi rembuk warga dan musyawarah, memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan ide, usulan, dan masukan untuk program PIPPK. Penggunaan pendekatan ini menciptakan suasana yang inklusif dan kondusif, di mana masyarakat merasa suaranya didengar dan dihargai. Hal ini menjadi strategi efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan kepedulian warga terhadap program pembangunan.
5. Dalam penerapan program PIPPK, terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman sebagian warga terhadap tujuan program dan keterbatasan sumber daya. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan partisipasi dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan membangun jaringan kemitraan dengan pihak luar, seperti lembaga non-pemerintah atau universitas, untuk memberikan pelatihan dan dukungan tambahan. Contohnya terdapat beberapa UMKM yang dapat dibantu seperti UMKM di RW 01 yaitu Kelompok UMKM Kaca Film, di RW 09 kelompok pembuat kue dan snack, dan di RW 07 Kelompok UMKM jasa pengelasan besi dan pagar.

SIMPULAN

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program PIPPK di Kelurahan Kacapiring membutuhkan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi yang efektif, penguatan peran lembaga kemasyarakatan, dan inovasi dalam metode partisipasi, diharapkan masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan di wilayahnya. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas program yang telah dijalankan, beberapa saran rekomendasi dapat diberikan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencapaian tujuan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Kacapiring. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan serta memperhatikan berbagai tantangan dan peluang yang ada di lapangan yang diantaranya yaitu:

1. Melakukan sosialisasi program secara terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan proses PIPPK. Dengan cara menggunakan berbagai media komunikasi seperti media sosial, pamflet, poster, dan pertemuan warga untuk menjangkau semua kalangan. Mengadakan forum diskusi interaktif di tingkat RW/RT dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan untuk memberikan penjelasan langsung. Memanfaatkan teknologi seperti grup WhatsApp komunitas untuk menyampaikan informasi secara cepat.
2. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan program PIPPK untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program. Dengan cara melakukan survei kebutuhan masyarakat menggunakan kuesioner sederhana untuk mengidentifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan. Mengadakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, serta melibatkan kelompok masyarakat seperti karang taruna, PKK, dan komunitas lokal untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan.
3. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan pemuda dengan memberdayakan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan dalam mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat. Dengan cara memberikan pelatihan kepemimpinan kepada tokoh masyarakat dan pemuda agar mampu menjadi fasilitator program. Membentuk kelompok kerja di tingkat RW/RT yang dipimpin oleh tokoh lokal untuk memantau pelaksanaan program dan melibatkan pemuda dalam kegiatan kreatif

- seperti lomba inovasi untuk mendukung implementasi program.
4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan cara mempublikasikan laporan penggunaan anggaran dan perkembangan program di papan informasi kelurahan atau media sosial. Mengadakan forum pertanggungjawaban rutin untuk menyampaikan hasil dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat untuk menerima masukan dan keluhan.
 5. Mengadakan pelatihan keterampilan yang mendukung peningkatan ekonomi dan kemandirian warga, seperti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan usaha kecil, dan keterampilan teknis. Memberikan pendampingan teknis kepada kelompok masyarakat yang ingin menjalankan proyek mandiri di bawah PIPPK. Bentuk kelompok belajar atau mentoring yang memungkinkan transfer pengetahuan antar warga.
 6. Pemanfaatan teknologi digital dengan menggunakan teknologi digital untuk memperluas jangkauan partisipasi dan mempermudah koordinasi. Adapun dengan cara mengembangkan aplikasi sederhana berbasis web atau mobile untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi, monitoring, dan pelaporan dan mengadakan pelatihan penggunaan teknologi bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, & Muh Sutrisno, (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang: *Jurnal MODERAT*, 5 (2), 1 – 15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Alia, Siti, dan Joko Maulana. (2019). Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2): 161-177
- Andi Uceng, Erfina, Ahmad Mustanir, & Sukri, (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang: *Jurnal MODERAT*, 5 (2), 18 – 32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Arnstein, Sherry R. (2019). A Ladder of Citizen Participation: *Journal of the American Planning Association*, 85 (1), 24 – 34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>

- Dimas Alji Prasetyo & Delmira Syafrini, (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat: *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 6 (1), 47 – 57. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.721>
- Fathurrahman Fadil, (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah: *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2 (2), 251 – 262.
- Femil Umeidini, Eva Nuriah, Muhammad Fedryansyah, (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kecamatan di Desa Mekargalih Jatinangor: *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2 (1), 13 – 22.
- Gustendi, G. (2018). Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. *Jurnal Manajemen*, 18(2), 107-118.
- Isakh, I. H., Rossa, J. C., Narendragharini, K. S., & Putri, K. N. S. (2020). Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 233-244.
- Islam Bouzguenda, Chaham Alalouch, & Nadia, (2019) Towards smart sustainable cities: A review of the role digital citizen participation could play in advancing social sustainability: *Sustainable Cities and Society* 50, 42-54. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101627>
- Kaharuddin, Satyawan Pudyatmoko, Chafid Fandeli, & Wisjnu Martani, (2020) Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Ekowisata: *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 14, 42-54. <https://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt>
- M. Riyanto, & Vitalina Kovalenko (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama: *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5 (2), 374 – 388.
- Paolo Cardullo & Rob Kitchin (2018). Being a 'citizen' in the smart city: up and down the scaffold of smart citizen participation in Dublin, Ireland: *GeoJournal, Spatially Integrated Social Sciences and Humanities*, 84, 1 – 13. <https://doi.org/10.1007/s10708-018-9845-8>
- Quick Kathryn S. and Bryson John M., (2022). Chapter 14: Public participation: Political Science and Public Policy 2022, 14, 158 – 168.

<https://doi.org/10.4337/9781800371972.00022>

Suryani, N., Sugiharto, B., & Anggraeni, D. (2019). Peran Kecamatan Bandung Wetan Dalam Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK). *Jurnal Manajemen*, 18(2), 107-118.

Turindra, Aziz. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.